

Judul : KKB Papua bakar sekolah, ini kejahatan serius, tindak tegas pelaku
Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

KKB Papua Bakar Sekolah

Ini Kejahatan Serius, Tindak Tegas Pelaku

SENAYAN mengecam keras aksi pembakaran gedung sekolah yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

Anggota Komisi II DPR Indrajaya menegaskan, pembakaran bangunan sekolah adalah tindakan kriminal yang sangat serius dan tidak dapat diterima. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembakaran bangunan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan umum yang dapat diancam dengan hukuman penjara.

"Aksi kekerasan yang dilakukan KKB menunjukkan Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih tegas dan komprehensif dalam menangani situasi keamanan di Papua," tegas Indrajaya dalam keterangan, Rabu (15/10/2025).

Diketahui, KKB kembali ber-

ulah di Papua dengan membakar bangunan sekolah di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin, (13/10/2025), pukul 07.00 WIT. KKB yang diduga dari Kodap XV Ngalum Kupeh membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma. Aksi ini langsung direspons oleh Satgas Operasi Damai Cartenz bersama TNI yang berhasil memukul mundur para pelaku setelah terjadi kontak tembak di sekitar lokasi.

Untuk mengatasi hal itu, Indrajaya memberikan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo, Pertama. Presiden perlu mengambil langkah-langkah tegas dan menyeluruh untuk menangani kekerasan KKB. Seperti, meningkatkan pengamanan di wilayah rawan, melakukan investigasi mendalam, dan memastikan para pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, Indrajaya menyarankan agar dialog dan mediasi dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam kekerasan

terus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi damai dan jangka panjang bagi masyarakat Papua.

Ketiga, Presiden diharapkan memerintahkan peningkatan koordinasi antara aparat keamanan, Pemerintah Daerah (Pemda), dan masyarakat sipil. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, stabil, dan kondusif bagi pembangunan di Papua.

Presiden harus tegas memerintahkan aparat hukum untuk menindak KKB dalam kasus pembakaran ini. Agar memberikan efek jera dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Pemerintah tidak boleh kalah dengan KKB," tegas politikus PKB ini.

Sementara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) For Papua Yorrys Raweyai menyesalkan bangunan sekolah menjadi sasaran perusakan oleh KKB di Papua. Seperti terjadi SMP Kiwirok, Pegunungan Bintang. Aparat keamanan harus

melakukan tindakan tegas dan investigasi secara menyeluruh terkait fenomena yang menimpa infrastruktur pendidikan di Papua Pegunungan.

"Apa pun itu, infrastruktur pendidikan adalah garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua," tegas wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Yorrys bilang, fenomena kekerasan terhadap tenaga pendidik di Tanah Papua sudah berulang kali terjadi. Sejak awal tahun 2025 hingga saat ini, sudah puluhan tenaga pendidik mengalami kekerasan. Di antaranya ada yang kehilangan nyawa, hingga mengalami luka berat.

"Kejadian ini tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya, kekerasan terhadap oknum tenaga pendidik tidak bisa diterima atas alasan apapun," tegas Senator asal Papua ini.

Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma menambahkan,

kekerasan yang terus terjadi di dunia pendidikan di Papua Pegunungan memerlukan respons secara komprehensif dari semua pihak yang berkepentingan. Apalagi saat ini Papua mulai menuju Tanah Damai.

"Seluruh pihak harus mencurahkan perhatian secara serius atas puluhan korban tenaga pendidik selama tahun 2025 dan pembakaran sekolah tempat masyarakat menuntut ilmu," harap Filep dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Kata Filep, menyelesaikan masalah Papua tidak cukup lagi hanya dengan retorika perdamaian, terlebih persoalan KKB vs TNI/Polri. Sebab kekerasan yang menimpa guru dan hancurnya bangunan sekolah sudah menyangkut masalah kemanusiaan.

"Jadi bukan sekadar tentang perbedaan ideologi, tapi masa depan generasi Papua di masa yang akan datang," tutup ketua Komite III DPD bidang aspek pendidikan itu. ■ TIF